

ANALISIS TEOLOGIS–INTERSEKSIONAL TENTANG POSISI PEREMPUAN DALAM SISTEM KEKUASAAN MASKULIN–MAYORITARIAN DI INDONESIA

***Musa Aprindo Sirait, Riris Johanna Siagian**

Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematangsiantar, Indonesia

Abstract: *This study examines the representation of women in Indonesian politics through the combined frameworks of intersectionality and Critical Discourse Analysis (CDA). Although the 30 percent gender quota has increased women’s descriptive representation, the findings indicate that their presence in parliament has not yet translated into substantive representation. CDA results reveal five recurring patterns of tokenism experienced by women legislators: non-strategic ballot placement, assignment to domestic or “feminine” policy areas, limited access to strategic positions, internal party stereotypes, and symbolic representation without meaningful legislative influence. These barriers are intensified for women from religious minority groups, who encounter double marginalization due to the intersection of gender, religion, and social class. The theological dimension of this study highlights the need to reconstruct women’s spirituality through approaches such as Kartini’s womb theology and the Batak concept of Ina na Marsahala. These frameworks affirm women as imago Dei with inherent dignity, creativity, and full agency in both public and religious life. The study concludes that achieving substantive representation requires structural reforms within political parties, enhanced capacity-building for women legislators, and emancipatory reinterpretations of religious discourse. This research contributes both theoretically and practically to the understanding of women’s political representation in Indonesia.*

***Korespondensi:**

musaaprindo04@gmail.com

Keywords: CDA, feminist theology, Indonesian politics, intersectionality, tokenism, women’s representation

Kata Kunci: CDA, interseksionalitas, politik Indonesia, representasi perempuan, teologi perempuan, tokenisme



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis representasi perempuan dalam politik Indonesia dengan menggunakan kerangka interseksionalitas dan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Meskipun kebijakan kuota 30 persen telah meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di parlemen belum beranjak dari representasi simbolik menuju representasi substantif. Data CDA mengungkap lima pola tokenisme yang secara konsisten dialami perempuan, yaitu penempatan pada nomor urut tidak strategis, pengkategorian pada isu domestik, keterbatasan akses terhadap posisi strategis, stereotip internal partai, dan representasi simbolik tanpa dampak legislasi. Hambatan ini semakin kompleks bagi perempuan dari kelompok agama minoritas, yang mengalami marginalisasi ganda akibat persilangan identitas gender, agama, dan kelas sosial. Dalam konteks teologis, penelitian ini menyoroti perlunya rekonstruksi spiritualitas perempuan melalui pendekatan teologi rahim Kartini dan konsep Ina na Marsahala. Keduanya menegaskan perempuan sebagai imago Dei yang memiliki martabat dan agensi penuh dalam ruang publik maupun religius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan substantif hanya dapat dicapai melalui reformasi struktural partai politik, penguatan kapasitas legislator perempuan, serta reinterpretasi wacana keagamaan yang membebaskan. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika representasi perempuan dalam politik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia menunjukkan peningkatan secara kuantitatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase

perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) naik dari 21,09 persen pada tahun 2020 menjadi 22,46 persen pada tahun 2024. Pada Pemilu 2024, dari 580 anggota DPR terpilih, sebanyak 127 merupakan perempuan atau sekitar 22,1 persen, sementara di DPRD provinsi jumlahnya hanya mencapai 18,4 persen. Meskipun tren ini mengindikasikan berkembangnya partisipasi perempuan, capaian tersebut masih jauh dari target kuota 30 persen yang diatur melalui kebijakan afirmasi pemilu. Peningkatan ini lebih menggambarkan keberhasilan representasi deskriptif daripada representasi substantif.

Data resmi dari BPS maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga belum memerinci keterwakilan perempuan berdasarkan identitas agama, etnisitas, atau status minoritas lainnya. Akibatnya, pengalaman perempuan dari kelompok agama minoritas tidak terbaca dalam statistik nasional, padahal mereka menghadapi kerentanan berlapis: diskriminasi gender dalam struktur kekuasaan yang maskulin sekaligus eksklusif karena identitas agama mereka dalam sistem sosial-politik yang mayoritarian. Survei Aspinall, White, dan Savirani (Aspinall, Edward, 2021) menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih yang menolak kandidat perempuan melakukannya karena tidak mengenal kandidat tersebut, tetapi sebagian lainnya menolak dengan alasan bahwa perempuan tidak pantas memimpin atau karena alasan religius. Temuan ini menegaskan bahwa hambatan bagi perempuan tidak berhenti pada persoalan gender, tetapi juga melibatkan penilaian moral dan religius yang bekerja dalam wacana publik.

Kondisi ini tampak jelas dalam kasus-kasus diskriminasi elektoral yang dialami perempuan Kristen di wilayah mayoritas Muslim, atau perempuan dari kelompok Ahmadiyah dan Syiah yang kesulitan memperoleh dukungan elektoral karena identitas agama mereka dianggap problematis. Kasus-kasus inilah yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA), penelitian ini menganalisis teks media lokal, wacana kampanye, dan dokumen resmi untuk melihat bagaimana wacana sosial-politik membentuk dan membatasi representasi perempuan dari kelompok agama minoritas. Sejalan dengan saran reviewer, pendahuluan ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya berbicara tentang isu perempuan, politik, dan agama secara umum, tetapi bertumpu pada kasus representasi perempuan minoritas agama sebagai sumber primer penelitian.

Di ruang wacana publik, kehadiran perempuan kerap dijadikan indikator keberhasilan demokratisasi dan komitmen terhadap inklusivitas. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan mereka mempengaruhi agenda kebijakan. Penelitian Prihatini (2019, 2023) mengungkap bahwa perempuan sering ditempatkan pada komisi-komisi yang dianggap feminim, seperti pendidikan, sosial, dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses mereka terhadap bidang strategis sangat terbatas. Praktik ini menggambarkan tokenisme politik, yakni ketika perempuan tampil secara simbolik tetapi tidak dibekali pengaruh nyata dalam proses legislasi. Keterbatasan perempuan dalam struktur parlemen juga diperparah oleh proses legislasi yang tidak inklusif dan minim

transparansi, seperti terlihat pada pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat dikendalikan oleh elit politik dan tidak membuka ruang bagi kelompok perempuan.

Sejumlah literatur telah menganalisis representasi dan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Wängnerud (2009) membedakan representasi deskriptif dan substantif, sedangkan Kania (2015) meneliti dinamika kebijakan afirmasi gender. Prihatini (2019) menelaah distribusi penempatan legislator perempuan di komisi, dan Aspinall dkk. (2021) menelaah kecenderungan pemilih dalam mendukung kandidat perempuan. Namun, kajian yang menggabungkan analisis interseksionalitas gender dan agama minoritas dalam konteks representasi politik masih sangat terbatas. Demikian pula, penelitian yang menggunakan *Critical Discourse Analysis* untuk membaca wacana yang membentuk tokenisme terhadap perempuan minoritas agama belum mendapat perhatian yang cukup. Selain itu, pendekatan teologi kontekstual, seperti teologi rahim dan konsep *Ina Na Marsahala*, juga belum ditempatkan secara eksplisit sebagai kerangka reflektif dalam kajian representasi perempuan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: bagaimana wacana politik dan keagamaan mayoritarian membentuk dan membatasi representasi perempuan dalam struktur kekuasaan; apakah keterwakilan perempuan di Indonesia merefleksikan representasi substantif atau justru memperlihatkan praktik tokenisme; dan bagaimana perempuan dari kelompok agama minoritas mengalami marginalisasi berlapis dalam proses representasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana wacana politik dan agama bekerja dalam membentuk representasi perempuan minoritas agama, mengidentifikasi keterbatasan struktural dan bentuk tokenisme yang mereka alami, serta menawarkan rekonstruksi teologis melalui konsep teologi rahim dan *Ina Na Marsahala* sebagai perspektif alternatif yang menegaskan martabat perempuan sebagai imago Dei.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi analisis interseksionalitas gender-agama, penerapan CDA berbasis studi kasus perempuan minoritas agama, dan penggunaan teologi kontekstual sebagai fondasi etis untuk membongkar struktur patriarki dan mayoritarian. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana representasi perempuan dalam politik Indonesia dengan menghadirkan analisis multidisipliner yang lebih sensitif terhadap identitas silang. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi kebijakan afirmasi gender, partai politik, dan pendidikan politik perempuan. Sementara secara teologis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teologi pembebasan yang berorientasi pada pemulihan martabat dan agensi perempuan dalam ruang publik maupun religius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dengan fokus pada analisis representasi perempuan dari kelompok agama minoritas dalam konteks politik

Indonesia. Langkah penelitian dimulai dengan penetapan *kasus utama*, yaitu pengalaman dan representasi seorang calon legislatif perempuan Kristen pada Pemilu 2024 di wilayah mayoritas Muslim. Kasus ini dipilih karena mencerminkan persilangan identitas gender dan agama yang menjadi pokok analisis.

Data primer diperoleh dari dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum mengenai daftar calon legislatif, pemberitaan media lokal yang meliput dinamika pencalonan kandidat tersebut, serta materi kampanye yang beredar di media sosial, termasuk komentar publik dan narasi digital yang berkembang selama masa kampanye. Data sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai representasi perempuan, politik identitas, interseksionalitas, dan kajian agama, sebagaimana yang dibahas dalam karya Crenshaw (2013; 2013), Collins dan Bilge (2020), serta Prihatini (2019, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA) ala Fairclough (2003), melalui pembacaan teks, penelusuran praktik produksi wacana, dan pengaitan temuan dengan konteks sosial-politik yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola bahasa, strategi framing, dan struktur kuasa yang mempengaruhi representasi kandidat perempuan tersebut. Lensa interseksionalitas digunakan untuk menafsirkan bagaimana identitas gender dan agama berkelindan dalam membentuk pengalaman diskriminatif, termasuk bagaimana wacana publik mempersoalkan kompetensi dan legitimasi kandidat berdasarkan kedua identitas tersebut.

Proses analisis dilakukan secara bertahap dan berulang dengan membandingkan berbagai sumber untuk menjaga konsistensi temuan. Melalui langkah metodologis ini, penelitian memperoleh gambaran yang sistematis mengenai cara wacana dan struktur sosial membentuk, membatasi, atau menegaskan representasi perempuan minoritas agama dalam arena politik.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan objektif mengenai representasi kandidat perempuan Kristen sebagai kelompok agama minoritas dalam kontestasi Pemilu 2024 di salah satu wilayah mayoritas Muslim. Temuan awal menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan secara nasional belum sepenuhnya tercermin dalam dinamika politik di tingkat daerah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, keterwakilan perempuan di DPR RI pada periode 2024–2029 mencapai 22,1 persen, sedangkan di daerah kasus penelitian perempuan hanya menempati delapan hingga sepuluh persen daftar calon legislatif partai-partai besar.

Analisis terhadap dokumen pencalonan menunjukkan bahwa kandidat perempuan Kristen dalam kasus ini ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis, yaitu pada nomor empat atau lebih rendah, yang secara empiris mengurangi peluang elektoral. Materi kampanye resmi dari partai juga memperlihatkan bahwa kandidat perempuan memperoleh porsi publikasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan kandidat laki-laki.

Pemberitaan media lokal selanjutnya memperlihatkan pola framing yang menonjolkan identitas agama kandidat alih-alih agenda politik atau kompetensinya. Dalam sejumlah berita, identitas Kristen kandidat lebih sering disebutkan dibanding prestasi atau rekam jejaknya. Pola serupa terlihat pada komentar publik di media sosial, di mana dukungan memang muncul, tetapi proporsi penolakan lebih besar. Penolakan tersebut umumnya berfokus pada dua alasan utama: keraguan terhadap kepemimpinan perempuan dan keberatan atas identitas agama minoritas kandidat di daerah mayoritas Muslim.

Distribusi isu kampanye juga menunjukkan perbedaan mencolok antara kandidat perempuan dan laki-laki. Kandidat perempuan diarahkan pada isu sosial dan pelayanan, sedangkan kandidat laki-laki lebih sering mengusung isu ekonomi dan politik strategis. Selain itu, dokumentasi kegiatan kampanye memperlihatkan keterbatasan akses kandidat perempuan Kristen terhadap jaringan tokoh masyarakat lokal, yang cenderung memprioritaskan kandidat dari kelompok mayoritas.

Secara keseluruhan, temuan empiris ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan simbolik yang memengaruhi representasi kandidat perempuan Kristen dalam arena politik daerah. Ringkasan temuan objektif disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Temuan Utama Penelitian tentang Representasi Perempuan Kristen dalam Kontestasi Politik di Wilayah Mayoritas Muslim (Pemilu 2024)

No.	Kategori Temuan	Deskripsi Temuan Objektif	Sumber Data
1	Representasi Kuantitatif	Keterwakilan perempuan secara nasional mencapai 22,1 persen pada Pemilu 2024. Di daerah kasus penelitian, perempuan hanya menempati 8–10 persen daftar calon legislatif partai besar.	Dokumen KPU, daftar calon legislatif
2	Penempatan Nomor Urut	Kandidat perempuan Kristen ditempatkan pada nomor urut tidak strategis (nomor 4 ke bawah), sehingga peluang elektoral berkurang signifikan.	Dokumen KPU, materi kampanye partai
3	Pemberitaan Media	Media lokal menyoroti identitas agama kandidat lebih sering daripada program politiknya. Pemberitaan netral minim; pemberitaan dengan nada keberatan muncul dalam konteks identitas agama.	Artikel media lokal (online dan cetak)
4	Respons Publik di Media Sosial	Komentar publik berisi dukungan dan penolakan; penolakan lebih dominan dengan dua alasan utama: keraguan terhadap kepemimpinan perempuan dan keberatan atas identitas Kristen di wilayah mayoritas Muslim.	Analisis komentar publik di media sosial
5	Distribusi Isu Kampanye	Kandidat perempuan diarahkan pada isu sosial dan pelayanan masyarakat; kandidat laki-laki mengampu isu ekonomi dan politik strategis.	Poster digital kampanye, naskah orasi
6	Akses ke Tokoh Masyarakat	Kandidat perempuan Kristen memiliki keterbatasan akses ke tokoh masyarakat mayoritas; undangan kampanye lebih banyak berasal dari komunitas Kristen.	Dokumentasi kegiatan kampanye

7	Pola Wacana yang Dominan	Tiga wacana utama ditemukan: (1) keterbatasan kepemimpinan perempuan, (2) wacana mayoritarian yang menilai kandidat minoritas kurang tepat, (3) politisasi identitas agama dalam pembentukan persepsi elektoral.	Analisis wacana (CDA) terhadap seluruh data
---	--------------------------	--	---

Temuan empiris di atas memperlihatkan bahwa representasi kandidat perempuan Kristen tidak hanya ditentukan oleh struktur formal politik, tetapi juga oleh cara wacana publik membingkai identitas mereka dalam ruang sosial. Untuk memahami bagaimana ketiga pola wacana tersebut bekerja secara simultan dan membentuk pengalaman marginalisasi, diperlukan analisis yang lebih mendalam melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* dan kerangka interseksionalitas.

PEMBAHASAN

Representasi Perempuan: Antara Substantif dan Tokenisme

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan di DPR RI melalui kebijakan kuota tiga puluh persen belum sepenuhnya menghasilkan representasi substantif. Secara normatif, kuota dirancang untuk memperluas peluang perempuan berpartisipasi dalam politik elektoral. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini lebih banyak menghasilkan capaian deskriptif daripada transformasi substantif. Banyak penelitian menegaskan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif tidak otomatis berbanding lurus dengan keluaran kebijakan yang responsif gender (Celis & Childs, 2012; Wängnerud, 2009). Kondisi di Indonesia memperlihatkan pola serupa. Meskipun keterwakilan perempuan meningkat dari pemilu ke pemilu, pengaruh mereka dalam menentukan agenda kebijakan tetap terbatas, bahkan sering terpinggirkan oleh struktur politik yang dikendalikan elite partai (Amalia et al., 2021; Prihatini, 2019).

Struktur politik Indonesia yang multipartai dan sangat terdiferensiasi menciptakan dinamika kompetisi internal yang kuat, di mana akses terhadap posisi strategis lebih ditentukan oleh loyalitas kepada elite partai daripada kapabilitas legislasi. Dalam konteks ini, perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang tidak strategis, baik dalam daftar calon maupun dalam pembagian komisi setelah terpilih. Studi Fox dan Lawless (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan ambisi politik perempuan bukan hanya persoalan preferensi individu, tetapi berkaitan erat dengan hambatan struktural dan budaya politik yang lebih luas, termasuk dominasi elite laki-laki dan bias institusional dalam sistem multipartai. Pola ini sangat relevan dengan konteks Indonesia, di mana perempuan kerap diarahkan untuk menangani isu-isu yang dianggap "*feminine-coded*", seperti sosial, pendidikan, atau kesejahteraan, sehingga ruang pengaruh mereka tidak menyentuh inti kekuasaan negara.

Fenomena ini mengarah pada praktik tokenisme, yaitu kondisi ketika perempuan hadir secara simbolik untuk memenuhi tuntutan normatif demokrasi, namun tidak memiliki posisi tawar signifikan dalam pengambilan keputusan. Philips (2020) menyatakan bahwa tokenisme merupakan bentuk representasi semu yang mempertahankan struktur kekuasaan maskulin sambil mengklaim keterbukaan terhadap perempuan. Dalam konteks Indonesia, tokenisme diperkuat oleh mekanisme rekrutmen partai yang hierarkis, ketergantungan pada sumber daya politik, serta stereotip gender yang menilai perempuan kurang layak memegang posisi strategis. Dengan demikian, representasi perempuan di DPR Indonesia masih lebih mencerminkan keterwakilan formal tetapi belum mencapai makna substantif, karena kuota bergerak dalam sistem politik yang tetap dikendalikan oleh elite laki-laki dan budaya patriarkal.

Pola Tokenisme dalam Representasi Politik Perempuan

Analisis wacana kritis (CDA) dalam penelitian ini mengungkap lima pola utama tokenisme yang dialami perempuan anggota DPR, khususnya kandidat perempuan Kristen dalam Pemilu 2024. Pola-pola ini menunjukkan bahwa tokenisme bukan hanya persoalan proporsi numerik, melainkan sebuah praktik struktural yang dipertahankan melalui bahasa, produksi wacana politik, hingga norma sosial. Penemuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa representasi perempuan dalam politik sering bersifat simbolik dan dikendalikan oleh logika patriarkal partai politik (Krook & Mackay, 2011; Philips, 2020).

Tabel 2. Hasil Analisis *Critical Discourse Analysis* (CDA) terhadap Representasi Kandidat Perempuan Kristen dalam Pemilu 2024

No	Dimensi Analisis CDA	Temuan Objektif	Contoh Data / Indikator
1.	Representasi dalam Teks (Text Analysis)	Identitas agama kandidat lebih sering muncul dibandingkan kompetensi atau program politik.	Judul berita menggunakan frasa seperti "Caleg Perempuan Kristen di Wilayah Mayoritas Muslim".
		Penekanan pada sifat atau stereotip gender seperti "lemah", "tidak cocok memimpin", atau "tidak sesuai kultur setempat".	Komentar publik dan caption media: "Perempuan tidak cocok jadi wakil rakyat di sini."
		Materi kampanye kandidat mengekspos isu domestik dan sosial, bukan isu strategis.	Poster dan brosur kampanye yang menonjolkan kegiatan sosial dibandingkan visi politik.
2.	Praktik Produksi Wacana (Discourse Practice)	Media lokal lebih sering memproduksi berita berbasis identitas daripada isu kebijakan.	Pola pemberitaan yang menyoroti agama kandidat saat mendaftar sebagai caleg.
		Partai politik memproduksi materi kampanye yang minim memperkuat citra kompetensi kandidat perempuan.	Kandidat laki-laki ditampilkan lebih sering dalam kanal resmi partai.
		Narasi kampanye digital dipengaruhi oleh aktor informal seperti akun komunitas lokal, bukan oleh kandidat.	Tren komentar publik yang lebih menentukan framing daripada konten resmi kandidat.

3.	Praktik Sosial (Social Practice)	Norma mayoritarian menilai kandidat dari agama minoritas kurang tepat untuk wilayah tersebut.	Ungkapan penolakan publik seperti “Kurang representatif bagi daerah kami.”
		Budaya patriarki mempengaruhi akses kandidat perempuan ke jaringan tokoh masyarakat.	Kandidat perempuan menerima undangan terbatas ke forum komunitas mayoritas.
		Politisasi identitas agama digunakan untuk membangun persepsi elektoral.	Komentar yang mempertanyakan loyalitas agama kandidat atau “kesesuaian moral” sebagai wakil rakyat.

Pertama, tokenisme terlihat dari penempatan kandidat perempuan pada nomor urut tidak strategis, sebuah pola yang telah lama dicatat oleh Prihatini (2019) dan diperkuat dalam temuan CDA bahwa partai lebih menonjolkan kandidat laki-laki dalam materi publik. Hal ini membatasi peluang elektoral perempuan sejak tahap awal rekrutmen.

Kedua, terdapat pola pengkategorian isu domestik yang dilekatkan secara konsisten pada kandidat perempuan. Analisis teks menunjukkan bahwa poster kampanye, pemberitaan media, dan framing publik lebih menyoroti kegiatan sosial atau peran moral perempuan, bukan kompetensi legislatif. Temuan ini memperkuat argumen Celis dan Childs (2018) bahwa perempuan sering diposisikan sebagai “penjaga moral”, sehingga tidak dianggap layak menangani isu strategis seperti anggaran atau keamanan.

Ketiga, perempuan mengalami minimnya akses terhadap posisi strategis, baik sebelum maupun sesudah pemilu. Dalam praktik produksi wacana, partai politik mengontrol ekspos kandidat melalui kanal resmi dan lebih sering mempromosikan kader laki-laki. Pola ini menunjukkan bentuk eksklusi institusional yang mengakar dalam mekanisme rekrutmen dan promosi internal partai.

Temuan ini sejalan dengan Wardani dan Subekti (2021), yang menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap sumber daya politik dan peluang elektoral sangat bergantung pada kedekatan dengan elite partai atau jaringan dinasti politik. Kandidat perempuan yang tidak memiliki modal sosial atau hubungan dinastis sering kali tersisih dari arena kompetitif dan ditempatkan pada posisi yang kurang strategis, baik dalam daftar calon maupun dalam struktur partai. Dengan demikian, eksklusi institusional tersebut memperkuat reproduksi struktur kekuasaan maskulin dalam sistem multipartai Indonesia.

Keempat, stereotip internal partai memperkuat batasan simbolik terhadap perempuan. Wacana publik yang menyebut perempuan sebagai “kurang cocok memimpin” menunjukkan bahwa identitas gender dan agama mereka diperlakukan sebagai hambatan elektoral.

Kelima, tokenisme muncul dalam bentuk representasi simbolik tanpa dampak legislatif signifikan. Ada kehadiran perempuan, tetapi tidak ada perluasan kewenangan atau agenda substantif yang mereka kontrol.

Dengan demikian, ditemukan bahwa tokenisme bekerja melalui tiga level CDA: teks, praktik produksi wacana, dan praktik sosial. Pola-pola ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan hadir dalam politik, struktur mayoritarian dan patriarki tetap mengatur sejauh mana mereka dapat berperan sebagai agen politik yang otonom.

Interseksionalitas sebagai Kerangka Analisis Hambatan Perempuan

Kerangka interseksionalitas yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (2013; 2013) memberikan landasan teoretis penting untuk memahami bahwa hambatan yang dialami perempuan dalam politik tidak bersifat tunggal, melainkan muncul dari persilangan berbagai kategori sosial seperti gender, kelas, identitas etnis, status ekonomi, dan afiliasi agama. Dalam konteks politik Indonesia, pendekatan ini sangat relevan karena struktur sosial-politik yang plural namun tetap didominasi oleh sistem patriarkal dan mayoritarian. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan yang berasal dari kelas menengah bawah, minoritas agama, atau kelompok etnis non-dominan memiliki hambatan yang lebih berat dibandingkan perempuan dari kelompok elite. Firdaus dan Wulandari (2023) menegaskan bahwa rendahnya representasi perempuan dalam politik Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor struktural—mulai dari minimnya dukungan institusional, bias budaya, hingga terbatasnya akses terhadap jaringan politik—yang memperkuat kerentanan perempuan dari kelompok non-dominan. Dengan demikian, interseksionalitas mengungkap dinamika ketimpangan yang bersifat berlapis, sekaligus menyoroti mengapa perempuan dari kelompok marjinal lebih rentan mengalami tokenisme dalam sistem politik yang masih bias gender.

Temuan CDA dalam penelitian ini memperkuat kerangka interseksionalitas tersebut. Pada level teks, wacana publik lebih banyak membingkai perempuan sebagai “pelengkap” dalam politik, bukan sebagai aktor utama. Identitas keagamaan kandidat perempuan Kristen, misalnya, lebih sering ditonjolkan dibandingkan kompetensinya, terutama ketika mereka bertarung di daerah mayoritas Muslim. Temuan ini sejalan dengan analisis Hughes (2011), yang menunjukkan bahwa perempuan dari kelompok minoritas cenderung mengalami double marginalization, yaitu diskriminasi berlapis berbasis gender sekaligus identitas kelompok.

Pada level praktik produksi wacana, partai politik dan media turut mereproduksi bias interseksional. Kandidat dari kelas sosial bawah cenderung menerima liputan yang minim, akses sumber daya kampanye yang terbatas, serta penempatan nomor urut yang tidak strategis. Budiatri (2021) mencatat bahwa struktur partai di Indonesia sangat hierarkis, sehingga kandidat yang tidak memiliki kapital sosial dan ekonomi cenderung ditempatkan dalam posisi tokenistik.

Pada level praktik sosial, norma mayoritarian mempersempit ruang gerak perempuan yang tidak berasal dari kelompok dominan. Giddens (2011) menyebut kondisi ini sebagai reproduksi struktural, di mana institusi sosial mempertahankan ketidaksetaraan melalui norma dan kebiasaan yang tampak “biasa”.

Dengan demikian, interseksionalitas menyingkap bahwa ketidaksetaraan politik perempuan tidak hanya disebabkan oleh bias gender, tetapi juga oleh persilangan faktor sosial lain yang memperkuat tokenisme dan membatasi agensi perempuan dalam proses legislasi. Framework ini menunjukkan bahwa memperbaiki representasi perempuan membutuhkan perubahan struktural yang lebih luas daripada sekadar peningkatan jumlah kursi.

Wacana Gender dan Agama dalam Politik Indonesia

Dalam konteks politik Indonesia yang sangat religius, wacana gender dan agama memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap legitimasi perempuan di ruang politik. Hambatan yang dihadapi perempuan tidak hanya bersifat struktural dan politik, tetapi juga berakar pada konstruksi kultural dan teologis yang memosisikan laki-laki sebagai pemimpin “alamiah” dan perempuan sebagai penjaga ranah domestik. Penelitian terbaru menegaskan bahwa tafsir keagamaan konservatif sering digunakan untuk membenarkan pembagian peran berbasis gender yang hierarkis, sehingga partisipasi perempuan dalam politik dipandang menyimpang dari norma sosial (Amalia et al., 2021). Kondisi ini sejalan dengan temuan global bahwa agama dapat menjadi alat legitimasi bagi struktur patriarki dan eksklusi gender dalam institusi politik (Krook & Mackay, 2011).

Di Indonesia, mayoritarianisme religius memperkuat stereotip bahwa perempuan kurang layak memegang otoritas publik, terutama di daerah dengan tingkat konservatisme religius yang tinggi. CDA dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kandidat perempuan Kristen, misalnya, sering menerima resistensi ganda: sebagai perempuan dan sebagai anggota kelompok agama minoritas. Wacana publik yang mempersoalkan “moralitas” atau “kesesuaian religius” perempuan kandidat menunjukkan bagaimana legitimasi politik dilekatkan pada tafsir-teks keagamaan yang maskulin. Fenomena ini konsisten dengan temuan Setiawan et al. (2020) bahwa politisasi Islam dan moralitas keagamaan sering digunakan untuk mendefinisikan siapa yang dianggap pantas atau sah berada dalam ruang publik, sehingga mempersempit ruang representasi kelompok non-dominan.

Namun demikian, penelitian feminis dalam kajian agama menunjukkan bahwa agama tidak monolitik. Tradisi keagamaan menyimpan potensi pembebasan yang dapat ditafsir ulang untuk mendukung kesetaraan gender. Mahmood (2005) menunjukkan bahwa agen perempuan dapat berkembang bahkan dalam komunitas religius konservatif, ketika perempuan menegosiasikan ruang spiritual dan sosial secara kreatif. Dalam konteks Indonesia, pembacaan teologis progresif—seperti teologi kesetaraan, hermeneutika pembebasan, atau tafsir kontekstual—telah menantang dominasi patriarki religius dengan menempatkan perempuan sebagai subjek moral dan spiritual yang otonom (Siagian, 2025; Stevanus, 2022).

Dengan demikian, agama dapat berfungsi sebagai instrumen pengekang sekaligus sumber pembebasan. Transformasi wacana gender dalam politik Indonesia akan bergantung pada sejauh

mana tafsir-teks keagamaan yang egaliter mampu diintegrasikan dalam diskursus publik untuk menantang legitimasi patriarki yang telah lama mengakar.

Politik Patriarkal–Mayoritarian dan Respons Teologis

Dalam sistem politik Indonesia yang mayoritarian, relasi kekuasaan tidak hanya dibentuk oleh struktur politik formal, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh wacana keagamaan yang meneguhkan dominasi laki-laki sebagai pemegang otoritas publik. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa agama, ketika dibaca melalui kacamata patriarkal, kerap digunakan untuk melegitimasi kepemimpinan laki-laki sebagai norma universal dan menempatkan perempuan dalam peran pendukung atau domestik (Amalia et al., 2021; Setiawan et al., 2020). Dalam konfigurasi seperti ini, perempuan bukan hanya mengalami marginalisasi politik, tetapi juga marginalisasi teologis—mereka dinilai kurang layak memimpin karena tafsir keagamaan yang menempatkan mereka sebagai subordinat secara moral maupun spiritual. Kondisi ini menguatkan temuan Crenshaw (2013) bahwa diskriminasi ganda dapat muncul dari persilangan antara identitas gender dan identitas religius atau kultural.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritarianisme religius memperparah kerentanan perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok agama minoritas. Identitas keagamaan perempuan kandidat sering dijadikan alat untuk mengukur “kelayakan moral”, sementara kompetensi politik justru terpinggirkan. Politisasi moralitas dan religiusitas dalam kampanye—yang sering ditandai dengan penekanan pada norma sosial tradisional—menjadi mekanisme halus untuk mempertahankan struktur patriarkal dalam politik elektoral.

Sebagai respons, teologi perempuan Indonesia menawarkan kerangka pembacaan baru yang menegaskan martabat, spiritualitas, dan agensi perempuan. Melalui *teologi rahim Kartini*, Stevanus (2022) mengartikulasikan rahim bukan sekadar organ biologis, tetapi simbol teologis daya cipta, kasih, dan kehadiran ilahi yang memulihkan martabat perempuan. Pendekatan ini menantang struktur maskulin politik-religius dengan menegaskan bahwa perempuan adalah imago Dei yang setara dalam kapasitas tanggung jawab publik.

Demikian pula, konsep *Ina na Marsahala* (Siagian, 2025) memberikan dasar teologis dan kultural untuk memahami perempuan sebagai pemilik sah—otoritas moral, spiritual, dan sosial yang bersumber dari Allah. Dalam perspektif ini, perempuan bukan pelengkap dalam struktur publik, tetapi subjek yang berdaya dan memiliki legitimasi spiritual untuk memimpin.

Dengan demikian, pembebasan perempuan di Indonesia membutuhkan pendekatan ganda: transformasi struktur politik yang bias gender dan rekonstruksi wacana teologis yang selama ini menormalisasi ketidaksetaraan. Respons teologis menjadi bagian penting dalam menantang dominasi patriarkal-mayoritarian dan membuka ruang bagi perempuan sebagai aktor politik penuh.

Temuan bagi Pengembangan Representasi Substantif

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pencapaian representasi substantif perempuan dalam politik Indonesia tidak dapat direduksi pada peningkatan jumlah kursi di parlemen. Representasi substantif menuntut perubahan struktural, kultural, dan institusional yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Literatur mutakhir menekankan bahwa kuota hanyalah langkah awal, sementara efektivitasnya bergantung pada sejauh mana institusi politik menyediakan ruang agensi yang setara bagi perempuan (Franceschet & Piscopo, 2008; Prihatini, 2019).

Pertama, reformasi internal partai politik menjadi kebutuhan mendesak. Sistem rekrutmen yang masih didominasi elite laki-laki menyebabkan perempuan sering ditempatkan dalam posisi tidak strategis atau di wilayah elektoral sulit. Wardani dan Subekti (2021) menegaskan bahwa tanpa perubahan pada mekanisme kaderisasi, penempatan calon, dan distribusi sumber daya kampanye, perempuan akan terus mengalami tokenisme meskipun jumlah mereka meningkat.

Kedua, pendidikan politik perempuan perlu diperkuat melalui pelatihan kepemimpinan, literasi legislasi, dan peningkatan kapasitas advokasi. Studi *Westminster Foundation for Democracy* (WFD, 2023) menunjukkan bahwa perempuan dengan pelatihan formal cenderung memiliki posisi tawar lebih kuat dalam negosiasi internal partai maupun fungsi legislasi.

Ketiga, dukungan institusional harus diperluas melalui penyediaan staf ahli, anggaran yang memadai, serta jejaring lintas komisi dan lintas partai. Dukungan institusional semacam ini terbukti signifikan dalam memperkuat agenda kebijakan perempuan di parlemen (Franceschet & Piscopo, 2008).

Keempat, reinterpretasi teologis yang membebaskan menjadi bagian penting dalam konteks Indonesia yang religius. Pendekatan teologis progresif seperti *teologi rahim* (Stevanus, 2022) dan *Ina na Marsahala* (Siagian, 2025) membantu menantang legitimisasi teologis patriarki dan membangun wacana keagamaan yang mendukung kepemimpinan perempuan.

Kelima, penguatan kapasitas legislasi berbasis gender diperlukan agar perempuan mampu menginisiasi, merumuskan, dan mengawal kebijakan publik yang responsif gender. Penelitian Franceschet dan Piscopo (2008) menunjukkan bahwa legislator perempuan yang memiliki kapasitas teknis tinggi lebih mungkin mendorong agenda substantif dibanding mereka yang hanya hadir secara simbolik. Dengan demikian, representasi substantif baru dapat tercapai ketika perubahan struktural politik berjalan seiring dengan transformasi kultural dan teologis yang menghapus hambatan terhadap agensi politik perempuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik Indonesia belum mencapai makna substantif karena berbagai hambatan struktural, kultural, dan teologis

yang saling berpotongan. Melalui kerangka interseksionalitas Crenshaw, penelitian ini menegaskan bahwa perempuan mengalami diskriminasi berlapis sebagai akibat dari persilangan antara gender, identitas agama, kelas sosial, dan struktur mayoritarian. Analisis CDA mengungkap bahwa wacana publik dan praktik politik masih mempertahankan stereotip perempuan sebagai aktor pelengkap, bukan subjek politik yang penuh agensi. Dalam perspektif teologis, tulisan ini menekankan pentingnya rekonstruksi spiritualitas melalui konsep teologi rahim dan nilai Ina na Marsahala untuk menegaskan martabat perempuan sebagai imago Dei yang setara, berdaya cipta, dan berhak penuh terlibat dalam ruang publik maupun religius.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi pustaka dan hanya mengandalkan data wacana sekunder tanpa verifikasi lapangan yang lebih luas. Selain itu, fokus pada satu studi kasus calon perempuan Kristen dalam Pemilu 2024 membuat temuan CDA ini belum dapat digeneralisasi ke seluruh konteks politik Indonesia yang sangat beragam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu melibatkan data empiris yang lebih kaya, seperti wawancara mendalam dengan legislator perempuan, observasi kampanye politik, serta analisis komparatif lintas daerah atau lintas agama untuk menguji konsistensi temuan interseksionalitas. Studi masa depan juga dapat mengeksplorasi respons teologis dari berbagai tradisi agama di Indonesia serta menilai bagaimana pendidikan politik, mekanisme partai, dan reformasi kebijakan dapat memperkuat representasi substantif perempuan secara lebih sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. S., Budiatri, A. P., Sweinstani, M. K. D., Kusumaningtyas, A. N., & Ekawati, E. (2021). Simultaneous elections and the rise of female representation in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 50–72. <https://doi.org/10.1177/1868103421989716>
- Aspinall, Edward, dkk. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 10. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Celis, K., & Childs, S. (2012). The Substantive Representation of Women: What to Do with Conservative Claims? *Political Studies*, 60(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x>
- Collins, P. H., & Sirma, B. (2020). *Intersectionality* (2 ed.). Polity Press.
- Crenshaw, K. (2013). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. In *Feminist Legal Theories* (hal. 23–51). Routledge.
- Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In *The public nature of private violence* (hal. 93–118). Routledge.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Routledge.
- Firdaus, F., & Wulandari, R. A. (2023). Implications of Low Women's Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 138–153. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.383>
- Fox, R. L., & Lawless, J. L. (2024). The Invincible Gender Gap in Political Ambition. *PS - Political Science and Politics*, 57(2), 231–237. <https://doi.org/10.1017/S1049096523000926>



- Franceschet, S., & Piscopo, J. M. (2008). Gender Quotas and Women's Substantive Representation: Lessons from Argentina. *Politics and Gender*, 4(3). <https://doi.org/10.1017/S1743923X08000342>
- Giddens, A. (2011). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pedati.
- Hughes, M. M. (2011). Intersectionality, quotas, and minority women's political representation worldwide. *American Political Science Review*, 105(3), 604–620. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000293>
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716.
- Krook, M. L., & Mackay, F. (2011). *Gender, Politics and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*. Palgrave Macmillan.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Philips, A. (2020). *The Politics of Presence, dalam The Oxford Handbook of Gender, War, and the Western World since 1600*. Oxford University Press.
- Prihatini, E. S. (2019). Women's Representation in Asian Parliaments: A QCA Approach. *Contemporary Politics*, 25(2), 716–734. <https://doi.org/10.1080/13569775.2018.1520057>
- Prihatini, E. S. (2023). Substantive Representation of Women in Indonesia. In D. K. Joshi & C. Echle (Ed.), *Substantive Representation of Women in Asian Parliaments* (hal. 106). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003275961-7/substantive-representation-women-indonesia-ella-prihatini>
- Setiawan, R., Esti, M., & Sidorov, V. V. (2020). Islam and Politics in Indonesia. *RUDN Journal of Political Science*, 22(4). <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-731-740>
- Siagian, R. J. (2025). Spiritualitas Ina na Marsahala dan Eksistensi Perempuan Batak: Suatu Kajian Teologi Sahala. *VISIO DEI Jurnal Teologi Kristen*, 7(1), 94. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v7i1.592>
- Stevanus, A. (2022). Rahim Perempuan Itu: Teologi Rahim Kartini Dalam Perjuangan Membangun Politik Identitas Perempuan Indonesia. *EUANGGELION: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 95–96. <https://doi.org/10.61390/euangelion.v3i1.44>
- Wängnerud, L. (2009). *Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation*. Routledge.
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political dynasties and women candidates in Indonesia's 2019 election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/186810342199114>
- WFD. (2023). *ASEAN Women's Political Leadership programme*. Westminster Foundation for Democracy (WFD). <https://www.wfd.org/where-we-work/advancing-equal-societies-through-womens-political-leadership-and-participation-asean>